LAMPIRAN

Lampiran 1

Formulir permohonan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen informasi publik dari BPK RI Jakarta Pusat

UMY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Program Studi Manajemen (Terakreditasi A, 2013)
- Program Studi Akuntansi (Terakreditasi A, 2015)
- Program Studi IESP (Terakreditasi A, 2016)

Nomor : 1663 /A.4-II/AKT/ IX /2018 Yogyakarta, 29 September 2018

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Badan Pemeriksa Keuangan RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi UMY, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

N a m a : Yuni Yanti Abi Sita
No. Mahasiswa : 20150420068
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Cokrokontang RT 04 RW 02, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta.

Tujuan : Untuk menyusun Skripsi yang berjudul:
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH, KOMPLEKSITAS, DAN OPINI AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Lokasi : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat
Waktu : 29 September 2018 - Selesai

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan
Dr. Fadah Sapitriyanesih, M.Si

ADDRESS CONTACT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon 021-25549000 Ext. 3912, Faksimili 021-57950288

Formulir Permohonan Informasi Publik
(Rangkap Dua)

Nomor : 403/PI/PIK/10/2018
Tanggal 03 Oktober 2018

Unit kerja tujuan :	PIK BPK RI
Cara Penyampaian :	Datang Langsung
DATA PEMOHON INFORMASI	
Nama	Yuni Yanti Abi sita
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat Rumah	Cokrokonteng RT 04 RW 02, Sidoarum, Godean, Sleman, Yk
Pekerjaan/Instansi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Kantor	Jl Lingkar selatan, Tamantirto, kasihan, Bantul, Yogyakarta
Email	yuniy.abisita@gmail.com
NO. KTP	3404026806970002
NO. TELP	0896 6843 9939
JENIS PENGAJUAN PERMINTAAN INFORMASI	
Jenis Pemrintaan Informasi	☑ Pemeriksaan ☐ Non Pemeriksaan
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	LHP Laporan keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012 - 2017
Tujuan Penggunaan Informasi	untuk data skripsi
Sumber Informasi**	☑ Pulbaket (Database) ☐ Unit .....
Cara Memperoleh Informasi**	1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mengirimkan Informasi**	1. ☑ Diambil Langsung 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ E-mail 5. ☐ Faksimili
Tanggal Pengeluaran Informasi	03 Oktober 2018

Informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
(Nama Jelas/NIP)	(Nama Jelas sesuai KTP)

Keterangan :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

(Rangkap Dua)

Nomor : 4163 /PI-PD/PIK/10/2018

Telah terima informasi berupa :

I. Jenis Data/Infomrasi : LHP Laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia Tahun 2012 - 2017

II. Tujuan Penggunaan Data/Informasi : Untuk data skripsi

III. Bentuk Data/ Informasi : ☑ Soft Copy
☐ Hard Copy

IV. Pemohon Data/Informasi
a. Nama : Yuni Yanti Abi Sita
b. Jabatan : Mahasiswa
c. Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
d. Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
e. No. Telp. /HP : (0274) 387656 ext. 117

Telah menerima dan menyatakan bahwa data/informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi

Jakarta, 3 Oktober 2018

Yang Menyerahkan,

Direktur Utama Syahrizal

Yang Menerima,

Catatan:
1. Tanda terima yang telah ditandatangani dikirimkan melalui faksimili ke 021-57950288
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silakan menghubungi nomor 021-25549000 ext. 3912

Lampiran 2

Daftar provinsi yang menjadi sempel penelitian

No.	Provinsi
1.	Aceh
2.	Bali
3.	Banten
4.	Bengkulu
5.	D.I Yogyakarta
6.	DKI Jakarta
7.	Gorontalo
8.	Jambi
9.	Jawa Barat
10.	Jawa Tengah
11.	Jawa Timur
12.	Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Selatan
14.	Kalimantan Tengah
15.	Kalimantan Timur
16.	Bangka Belitung
17.	Kepulauan Riau
18.	Lampung
19.	Maluku
20.	Maluku Utara
21.	Nusa Tenggara Barat
22.	Nusa Tenggara Timur
23.	Papua
24.	Papua Barat
25.	Riau
26.	Sulawesi Barat
27.	Sulawesi Selatan
28.	Sulawesi Tengah
29.	Sulawesi Tenggara
30.	Sulawesi Utara
31.	Sumatera Barat
32.	Sumatera Selatan
33.	Sumatera Utara

Lampiran 3

Item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian

Elemen Pengungkapan Wajib	Ya/Tidak
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat. 3. Kondisi persediaan.	
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 4. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 5. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 6. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang; 7. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 8. Investasi yang dinilai dengan 1 ngan nilai wajar dan alasan penerapannya; 9. Perubahan pos investasi	
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 10. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carriying amount); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir	

periode yang menunjukkan : 11. Penambahan; 12. Pelepasan; 13. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 14. Mutasi aset tetap lainnya Informasi penyusutan meliputi: 15. Nilai Penyusutan; 16. Metode Penyusutan yang digunakan; 17. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 18. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; 19. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 20. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 21. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 22. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: 23. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 24. Tanggal efektif penilaian kembali 25. Jika ada, nama penilai independen 26. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti 27. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap	
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 28. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu	

penyelesaiannya. 29. Nilai kontrak konstruksi dan sumber biayannya; 30. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 31. Uang muka kerja yang diberikan; 32. Retensi	
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 33. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan bedasarkan pemberi pinjaman; 34. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah bedasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 35. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 36. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; Perjanjian restrukturisasi utang meliputi : 37. Pengurangan pinjaman; 38. Modifikasi persyaratan utang; 39. Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 40. Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 41. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; 42. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 43. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang bedasarkan kreditur. Biaya pinjaman: 44. Perlakuan biaya pinjaman; 45. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; 46. Tingkat Kapitalisasi yang dipergunakan	

Lampiran 4

Hasil perolehan dari item pengungkapan laporan keuangan pemerintah

No.	Provinsi	DSCLR 2012	DSCLR 2013	DSCLR 2014	DSCLR 2015	DSCLR 2016	DSCLR 2017
1	Aceh	0.50	0.50	0.39	0.48	0.57	0.61
2	Bali	0.41	0.48	0.46	0.48	0.54	0.57
3	Banten	0.39	0.48	0.39	0.46	0.59	0.61
4	Bengkulu	0.37	0.46	0.41	0.41	0.50	0.54
5	D.I Yogyakarta	0.35	0.43	0.46	0.46	0.54	0.72
6	DKI Jakarta	0.43	0.50	0.43	0.50	0.57	0.63
7	Gorontalo	0.22	0.39	0.39	0.41	0.50	0.61
8	Jambi	0.33	0.41	0.41	0.48	0.50	0.65
9	Jawa Barat	0.39	0.43	0.41	0.43	0.52	0.61
10	Jawa Tengah	0.33	0.52	0.41	0.41	0.54	0.65
11	Jawa Timur	0.35	0.41	0.41	0.43	0.57	0.63
12	Kalimantan Barat	0.28	0.37	0.39	0.46	0.50	0.61
13	Kalimantan Sel	0.30	0.39	0.37	0.43	0.52	0.63
14	Kalimantan Teng	0.22	0.37	0.39	0.46	0.52	0.59
15	Kalimantan Timur	0.35	0.41	0.39	0.41	0.57	0.63
16	Bangka Belitung	0.37	0.41	0.52	0.57	0.59	0.70
17	Kepulauan Riau	0.35	0.39	0.39	0.48	0.57	0.61
18	Lampung	0.33	0.41	0.46	0.48	0.54	0.61
19	Maluku	0.35	0.41	0.46	0.43	0.54	0.61
20	Maluku Utara	0.33	0.37	0.46	0.46	0.52	0.67
21	NTB	0.37	0.43	0.39	0.43	0.50	0.63

22	NTT	0.35	0.39	0.37	0.41	0.54	0.61
23	Papua	0.37	0.39	0.37	0.52	0.52	0.70
24	Papua Barat	0.24	0.35	0.37	0.46	0.50	0.63
25	Riau	0.26	0.33	0.43	0.54	0.61	0.72
26	Sulawesi Barat	0.24	0.35	0.46	0.48	0.63	0.72
27	Sulawesi Selatan	0.41	0.39	0.46	0.43	0.57	0.61
28	Sulawesi Tengah	0.37	0.37	0.46	0.48	0.61	0.63
29	Sulawesi Tenggara	0.37	0.39	0.39	0.50	0.57	0.63
30	Sulawesi Utara	0.39	0.41	0.46	0.41	0.63	0.67
31	Sumatera Barat	0.37	0.41	0.41	0.43	0.57	0.59
32	Sumatera Selatan	0.28	0.37	0.39	0.48	0.61	0.70
33	Sumatera Utara	0.33	0.39	0.39	0.43	0.59	0.65